TAJUK RENCANA

Yatim Piatu Korban Covid-19

PILU dan entah perasaan apalagi yang mengharubiru, ketika kita membaca berita 248 anak kehilangan orang tuanya. Menjadi yatim kehilangan ayahnya, atau piatu karena ibunya meninggal, bahkan yatim piatu kehilangan kedua orantuanya, karena didera Covid-19. Jumlah tersebut adalah akumulasi korban Pandemi Covid-19 yang sudah hampir 2 tahun ini (KR, 24/8).

Di Kota Yogya saja, menurut keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya, Edy Muhammad ada 22 anak yang kini yatim piatu. Jumlah tersebut, masih masih akan tambah lagi kalau kita menghitung dampak yang ada di Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kulonprogo. Badai Covid-19 telah meluluhlantakan keluarga mereka.

Mereka semua dari usia dan latar belakang berbeda. Ada yang kakak beradik, ada yang memang dari keluarga kaya namun banyak yang juga dari keluarga tak mampu. Banyak juga yang semula dari keluarga berada, namun ketika tulang punggung keluarga meninggal, kemudian menjadi miskin.

Belum lagi jika dilihat usianya. Misalnya ada yang masih membutuhkan ASI, atau mungkin punya penyakit tertentu yang memerlukan penanganan kesehatan secara khusus. Kemudian juga masalah pendidikan mereka. Ada yang setingkat TK, SD atau sekolah menengah malah ada ada yang akan masuk kuliah, mereka sangat memerlukan perhatian dan tindakan khusus.

Ini harus menjadi perhatian. Sebab UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak mengamanatkan, pentingnya perhatian khusus kepada anak-anak tersebut, agar hak hidup dan tumbuh kembang anak-anak terlantar bisa dipenuhi dengan baik. Meski didera pandemi, namun tidak ada alas menelantarkan mereka dengan dalih gegara Covid-19 yang masih menjadi hantu kesehatan kita.

Kehilangan orangtua mendadak, dalam rentang waktu pendek pada saat mereka masih membutuhkan bimbingan orang-orang yang mereka sayangi. Kondisi yang berat lagi khususnya bagi anak-anak yang masih sangat memerlukan bimbingan dan biaya untuk pendidikan. Dampak psikososial mereka sangat berat, bahkan dalam waktu panjang bukan tidak mungkin trauma ini akan terus bergaung diingatannya ketika mendengar masalah Covid-19.

Ini juga terungkap di Yogya, bahwa banyak anak-anak yang masih terguncang secara psikis kalau mendengar kata-kata Covid-19. Ya kalau mereka punya keluarga dekat, kalau tidak? Tentu menyedihkan. Para pakar kesehatan bahkan mengkhawatirkan, jika kemudan bayi tidak terurus makanannya. Jangankan bicara soal gizi yang mustinya diperhatikan bagi anak-anak sesusianya, untuk makan yang rutin saja belum tentu cukup. Bukan hanya bahaya kurang gizi yang berdampak pada stunting misalnya, tetapi juga pada pertumbuhan otaknya. Padahal mereka termasuk salah satu harapan untuk generasi emas dalam bonus demografi mendatang.

Maka apa yang perlu dilakukan, untuk menjalankan amanah UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak, adalah mengurus mereka lebih serius. Diperlukan pemetaan yang diarahkan untuk mengetahui masalah-masalah tersebut secara detail. Mulai dari usia, kesehatan, kebutuhan khusus, pendidikan sampai kemudian terapi apa yang diperlukan. Pemerintah perlu menganggarkan dana khusus untuk mereka.

Inilah saatnya bangsa ini untuk saling membantu. Perguruan tinggi , korporasi, atau lembaga lain harus peduli untuk menangani. Pendampingan psikososial baik jangka pendek atau panjang. Pendampingan bukan hanya soal materi tetapi juga masalah piskososial. Yuk, saatnya kita berbagi. **(***)**

PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.
Naskah tidak berisi ujaran kebencian,SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Kurikulum Merdeka Belajar

KURIKULUM adalah sebuah perangkat yang berisi tentang tujuan dan arah pendidikan yang disiapkan, agar proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik dan teratur serta memenuhi standar pendidikan. Kurikulum juga merupakan perangkat sebagai jawaban dari berbagai kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat, berisi tentang pengalaman belajar siswa serta bagaimana cara menerapkan semua pengalaman yang diperoleh di kehidupan nyata. Melalui kurikulum merdeka belajar diharapkan dapat mendorong para guru untuk memilih materi atau metode pembelajaran dengan kualitas tinggi, namun tetap sesuai tingkat kompetensi, minat, dan bakat masing-masing siswa.

Kurikulum merdeka belajar diinisiasi agar tercipta suasana belajar yang bahagia bagi siswa, orangtua siswa serta semua orang tanpa kecuali. Kurikulum merdeka belajar sebagai rasionalisai dan penyederhanaan dari kurikulum 2013 untuk kelas 1, 4, 7 dan 10 tengah diimplementasikan di beberapa sekolah penggerak yang ditunjuk. Hal yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya adalah pada penerapan konsep merdeka belajar yang lebih menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan siswa serta sekolah. Seragamnya kompetensi anak tidak lagi menjadi tuntutan, malainkan guru diharapkan mengajar pada level yang sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga siswa dapat belajar tidak terlalu mudah namun juga tidak terlalu sulit.

Ki Hajar Dewantara, dalam salah satu ajarannya menyatakan bahwa jiwa merdeka diperlukan dalam menjalankan pendidikan untuk mencapai perkembangan kepribadian anak bangsa. Azas kemerdekaan sendiri merupakan darma kedua dari Pancadarma Taman Siswa. Jiwa yang merdeka dimaknai sebagai kepemilikan hak untuk bebas melakukan sesuatu. Merdeka dan bebas di sini dilakukan secara bertanggung jawab. Dengan demikian meskipun menyandang status sebagai jiwa merdeka, namun tetap dibatasi oleh norma yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak berbuat semaunya sendiri.

Kurikulum merdeka belajar lahir sebagai bentuk reformasi pendidikan berawal dari adanya keluhan tentang patokan nilai bagi siswa. Kata ëmerdeka belajarí dapat diartikan ëmerdeka berpikirí baik bagi pendidik maupun siswa. Strategi pembelajaran yang memerdekakan menekankan pada penggunaan pengetahuan secara bermakna dalam proses pembelajaran untuk menjawab pertanyaan, pandangan atau masalah yang dihadapai siswa. Aktivitas belajar lebih menekankan pada keterampilan berfikir kritis, analisis, membandingkan, generalisasi, memprediksi maupun menyusun hipotesis.

Pelaksanaan asesmen (penilaian) pada kurikulum merdeka belajar harus memerdekakan, menekankan proses penyusunan makna secara aktif yang melibatkan keterampilan terintegrasi pada permasalahan dalam konteks nyata serta menekankan pada keterampilan secara berkelompok. Keberagaman minat dan kemampuan yang dimiliki siswa menjadi alasan logis agar pengukuran kinerja siswa tidak hanya dinilai menggunakan angka-angka pencapaian akademik, melainkan harus mengakomodir dan memberikan pengakuan pada aktivitas lain di luar kelas sebagai bentuk pengembangan diri siswa.

Kurikulum merdeka belajar mengajak guru pemimpin pembelajaran, untuk menjadi penggerak bagi siswanya keluar dari zona nyaman memanfaatkan teknologi menggunakan Learning Management Sistem (LMS) malalui berbagai platform dan aplikasi pembelajaran agar terwujud Profil Pelajar Pancasila (P3). Enam aspek P3 adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta beakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Melakukan yang terbaik untuk siswanya adalah karakter yang harus dimiliki seorang guru merdeka di tengah pandemi untuk keluar dari krisis dengan resistensi atau imunitas kesehatan dan berkarakter.

Nurlaila Mahmudah
Guru Matematika
SMKN 3 Yogya.

Pandemi dan Bencana Putus Sekolah

Alfian Dj

PERJALANAN panjang Covid-19 di Indonesia sejak diumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo banyak menyisakan pekerjaan rumah bagi bangsa. Kadin mencatat hingga awal Oktober 2020 sudah lebih dari 6,4 juta pekerja di PHK. Sementara data Kementerian Keuangan per November 2020 saja peningkatan jumlah pengangguran sudah mencapai 9,77 juta orang. Kekhawatiran lain juga dirasakan oleh KPAI dengan meningkatnya perkawinan anak dimasa pandemi.

Tingginya angka kematian di Indonesia masih bertengger pada level diatas 2,5 % tentu akan menyisakan banyak persoalan baru. Terlebih lagi mengingat angka kematian tertinggi ada pada rentang umur 30-59 tahun. Bahkan berdasarkan data Kemensos melalui Satgas Penanganan Covid-19 per Juli 2021 ada 11.045 anak menjadi yatim, piatu, bahkan yatim piatu. Tingginya angka tersebut tentu menyisakan banyak persoalan baru yang harus segera dipikirkan dan diselesaikan bersama.

KPAI mencatat angka putus sekolah anak dimasa pandemi juga sangat tinggi. Hal itu disebabkan dengan latar belakang yang beragam. Mulai dari faktor pembelajaran jarak jauh yang banyak kendala, menunda sekolah, sampai dengan faktor ekonomi yang disebabkan hilangnya pekerjaan orang tua sampai dengan wafatnya orang tua yang selama menjadi tulang punggung keluarga. Yang menanggung biaya pendidikan si anak. Untuk menyikapi hal tersebut diperlukan peran serta semua pihak untuk dapat menahan lajunya 'bencana putus sekolah' di Indonesia.

Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai penaggungjawab utama keberlangsungan pendidikan bagi warga negaranya sudah sepatutnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah diharapkan mencari solusi tercepat untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Kebijakan yang dilahirkan diharapkan mampu menjamin tidak terjadinya 'bencana putus sekolah'.

Kebijakan tersebut harus bersifat jangka panjang dan mudah diakses masyarakat, kewajiban ini harus dilakukan sampai level daerah. Langkah awal yang bisa dilakukan dengan membuat data terpusat anak yang orang tuanya wafat dikarenakan pandemi Covid 19. Data tersebut menjadi acuan dalam memberikan kemudahan dan bantuan bagi anak anak tersebut.

KR-JOKO SANTOSO

Organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra kerja pemerintah harus terus digandeng pemerintah. Ormas mempunyai peran penting dalam membendung arus 'bencana putus sekolah'. Saat ini peran serta ormas dalam menangani pandemi Covid-19 terus bergulir tiada henti baik dilakukan Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan lainnya.

Saat ini Muhammadiyah DIY sudah memulai pendataan terhadap anak usia sekolah yang ditinggal orang tuanya. Tidak kurang dari 500 anak yang mendadak menjadi yatim, piatu bahkan yatim piatu. Selanjutnya nanti akan dipetakan terkait dengan kebutuhannya. Apakah kebutuhan keuangan sekolah, kesehatan, atau sampai bantuan pengasuhan orang tua asuh.

Peran Masyarakat

Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan untuk menjamin semua keluarga yang ada di lingkungan mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan usianya. Masyarakat dituntut untuk dapat membantu pemerintah dan juga ormas dalam memberikan informasi yang akurat serta lingkungan yang paling pertama mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mareka.

Saat ini semua elemen dituntut untuk terus bekerja sama dan bersinergi dalam menuntaskan Pandemi Covid 19 ini, setiap lini terus bekerja memerankan fungsinya masing-masing. Semua berharap anak anak yang ditinggal salah satu orang tuanya atau bahkan kedua orang tuanya tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak bahkan tidak hanya di tingkat menengah, akan tetapi juga sampai ke jenjang perguruan tinggi. Saat ini dipundak kita semua ada tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita mulia orang tua mareka untuk menyekolahkan mereka setinggi-tingginya.

*)**Alfian Dj**, *Staf Pengajar Muallimin Yogyakarta, Mahasiswa Program Doktor Fak Hukum UII .*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

TVRI di Era 'Post-truth'

Darmanto

TSUNAMI Informasi akibat bebasnya penggunaan smartphone, melahirkan era baru yang disebut *post-truth* (pascakebenaran). Disebut demikian karena banyak informasi yang beredar luas ternyata penuh kebohongan. Apa yang viral belum tentu berguna bagi public karena banyak mengandung kebohongan.

Mengapa muncul *post-truth*? Faktor utamanya karena terjadi perubahan kendali media. Piranti media bernama smartphone mendominasi sebagai perangkat akses informasi berada di bawah kendali individu dan bersifat personal. Setiap individu pemilik smartphone memiliki hak dan otoritas sejajar dengan individu lain dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (Pasal 28F UUD 1945). Akibatnya setiap orang, tanpa membeda-bedakan latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan sebagainya berkesempatan sama menyebarkan informasi ke jaringan internet. Karena penyebaran informasinya tidak melewati proses editing *gate keeper*, maka informasi yang disebar belum tentu berguna bagi publik. Belum tentu dilakukan cek ulang (*recheck*) kebenaran fakta dan substansinya, dan pertimbangan lainnya.

Berbeda halnya dengan era kebenaran (*truth*). Proses penyebaran informasi dari sumber kepada masyarakat luas termediasi organisasi media yang dikelola profesional, memiliki struktur jelas, dan prosedur kerja yang standar. Setiap informasi harus melewati sejumlah tahapan. Setelah informasi dikumpulkan orang pertama (reporter), selanjutnya dikoreksi editor. Sebelum disebar¨luaskan masih harus melewati proses kontrol pimpinan redaksi. Sehingga informasi yang disampaikan relatif dapat dipercaya dan tidak menimbulkan kebingungan masyarakat. Bahkan kalau sampai ada berita bohong, media yang bersangkutan akan mendapat sanksi hukum dan sanksi sosial.

Tantangan TVRI

Kini, di usianya yang ke-56 TVRI dihadapkan pada tantangan untuk menjadikan dirinya sebagai rujukan utama masyarakat dalam mencari informasi. Mengingat statusnya sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI mestinya dapat menjadi kiblat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipercaya sehingga memberikan kepastian bagi semua pihak dalam mengambil suatu keputusan.

Secara umum, layar TVRI saat ini memang tampak semakin cerah dengan program-program budaya, edukasi, dan hiburan. Namun, dari aspek jurnalismenya harus diakui masih perlu kerja keras agar berita-berita yang disiarkan TVRI merepresentasikan kepentingan publik. Karenanya TVRI perlu lebih banyak menampilkan karya-karya investigasi, dan mengembangkan jurnalisme bermakna sebagai konskuensi dari posisinya sebagai lembaga penyiaran publik. Sebab, kemampuan mengembangkan jurnalisme bermakna itulah yang akan menjadi pembeda antara berita-berita yang disiarkan TVRI dengan jurnalisme sensasional yang biasa dikembangkan lembaga penyiaran swasta.

TVRI sesungguhnya memiliki modal untuk bangkit menghadapi gempuran era *post truth* dengan lebih mengembangkan program jurnalisme. Laporan *Reuters Institute Digital News* (RIDN) 2021 menunjukkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TVRI tergolong bagus, yaitu pada urutan ketiga setelah CNN Indonesia dan Kompas, serta di atas detik.com dan Liputan 6 SCTV. Meskipun tingkat keterpercayaannya cukup tinggi, tetapi dilihat dari aspek aksesibilitas atau kebiasaan orang mengakses media yang bersangkutan, ternyata posisi TVRI berada di urutan kesembilan. Ini menunjukkan bahwa tingkat keterperca¨yaan tidak paralel dengan aksesibilitas.

Ada dua tantangan besar yang dihadapi TVRI guna mewujudkan dirinya sebagai media rujukan utama masyarakat dalam memperoleh informasi. Pertama, mening¨katkan kepercayaan masyarakat terhadap berita (*news*) yang menurut RIDN kini masih rendah (39%). Kedua, meningkatkan minat masyarakat untuk mengakses berita-berita yang disiarkan TVRI sehingga terjadi keseimbangan dengan aspek keterpercayaannya.

*)**Darmanto**, *ungsional Peneliti, Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) DIY periode 2019-2024.*

Pojok KR

Polri sudah izinkan sepakbola Liga 12 dan 2 bergulir.

-- Tapi jangan lupa, Covid-19 belum musnah.

***

Danais juga untuk bantu percepatan vaksinasi di DIY.

-- Saatnya menunjukkan, Danais juga untuk kemanusiaan.

***

Tingkat stress meningkat saat pandemi.

-- Diperlukan, cara menangani stress itu.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.